

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik yang terdiri dari wilayah-wilayah (daerah) provinsi, kabupaten/kota, di bawah kabupaten/kota terdiri dari beberapa kelurahan dan desa. Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di struktur pemerintahan di Indonesia, desa mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah desa yang paling dekat dan paling mengetahui kebudayaan masyarakat (Syahrul Syamsi, 2014).

Sebagai daerah otonom terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan segala urusan pemerintahannya (Vergie, 2013). Pemerintah pusat menilai bahwa perlunya desa menerima bantuan dana berfungsi untuk meningkatkan dan menggali potensi yang dimiliki oleh desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Utomo, 2022)

Menurut undang-undang No. 6 Tahun 2014, menjelaskan bahwa desa nantinya akan mendapatkan Dana Desa (DD). Desa mampu dan mandiri dalam mengelola keuangan, pemerintahan desa diharapkan mampu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup serta pengurangan kemiskinan. Dana Desa diperoleh sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), di mana kucuran Dana Desa itu tidak melewati perantara melainkan dari pemerintahan pusat langsung ke desa. Walaupun pada prakteknya Dana Desa tersebut disalurkan melalui kabupaten/kota sebagai

bentuk pengawasan. Tetapi jumlah nominal Dana Desa berbeda-beda untuk tiap-tiap desa. Alokasi APBN yang sebesar 10% nanti akan menambah penerimaan desa (Habibah 2017).

Di samping Dana Desa, Desa juga mendapatkan kucuran Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dukungan dana oleh pemerintah pusat dan daerah pada pemerintah desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. ADD merupakan substansi baru di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dana rangsangan pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan publik. Besar ADD tersebut berjumlah 30% dialokasikan untuk aparatur pemerintah desa sedangkan 70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik. Hal ini sangat membuktikan arti penting desa dan potensi desa secara luas dalam menunjang kesuksesan pemerintah pembangunan nasional (Henareza, 2014).

Perkembangan zaman yang maju seperti ini permasalahan yang masih dihadapi desa adalah kemiskinan, kemiskinan di desa masih menjadi permasalahan yang harus dipertimbangkan oleh semua otoritas kebijakan baik bersekalah Nasional maupun Provinsi maupun bersekalah Kabupaten dan tingkat terkecil yaitu pemerintahan desa. Dalam hal itu pemerintah desa memiliki peranan dalam mensejahterakan masyarakat desa dalam pendapatan dan pembiayaan pemerintah desa terdapat komponennya berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diharapkan dengan adanya penyuluhan, pelatihan, pembangunan di tingkat desa mampu memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat desa yang tercerminkan pada Undang-Undang Desa yang bisa berdampak pembangunan nasional, demi menciptakan desa yang maju, mandiri,

peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan desa, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai kemiskinan, dana desa dan alokasi dana desa yaitu Arfiansyah (2020), Dewi dan Irama (2018), Lalira *et al.*, (2018). Sunu dan utama (2018), Putra (2018), Wahyudi *et al.*, (2019) ini melihat apakah ada hubungan antara kemiskinan dengan dana desa dan alokasi dana desa yang berdampak pada masyarakat desa.

Kemiskinan adalah masalah yang dihadapi oleh setiap negara di dunia. Menurut World Bank menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapitanya. Penduduk yang berpendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan per kapita nasional, maka termasuk dalam kategori miskin. Berikut ukuran kemiskinan menurut World Bank adalah USD\$2 perorang per hari. Menurut World Bank salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and asset*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Disamping itu kemiskinan juga berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikatakan miskin (*poor*) adalah tidak memiliki pekerjaan (*pengangguran*), serta tingkat pendidikan dan kesehatan tidak baik (*Ibid: 871*)

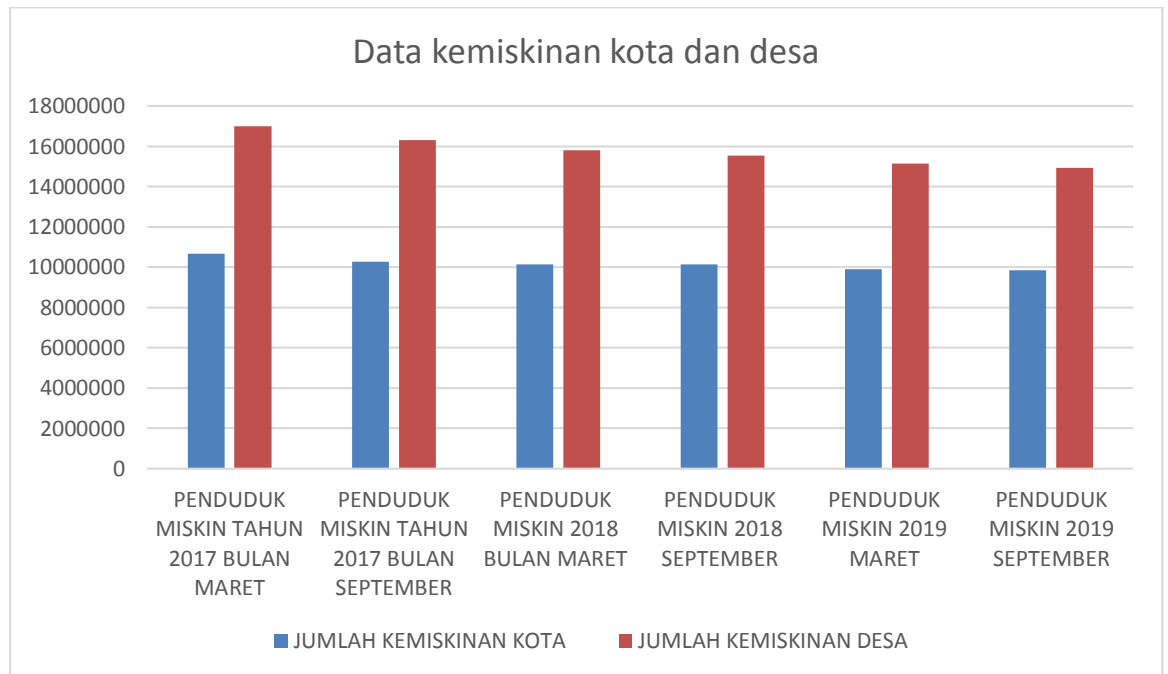
Kemiskinan bukan hanya masalah Indonesia, tetapi merupakan masalah dunia sehingga lembaga-lembaga dunia seperti Bank Dunia lewat laporannya *World Development Report on Poverty* mendeklarasikan bahwa suatu peperangan yang berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga tempat. (Mankiw, 2011:11)

1. Pertumbuhan ekonomi yang luas dan padat karya yang menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi kelompok miskin.
2. Pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan, dan gizi) yang memberi mereka kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan- kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi.
3. Membuat sarana jaringan pengaman sosial untuk mereka diantara penduduk miskin yang sama sekali tidak mampu untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan kesempatan pengembangan SDM akibat ketidak mampuan fisik dan mental, bencana alam dan konflik sosial.

Menurut Lalira *et al.*, (2018) kemiskinan menjadi salah satu masalah yang di hadapi Negara berkebang seperti Negara Indonesia kemiskinan sangat rentan pada daerah perdesaan dari pada daerah perkotaan dengan adanya dana desa diharapkan bisa menjadi solusi penyelesaian masalah ekonomi Indonesia dana desa dengan penganggaran Negara APBN Dana Desa merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Prioritas penggunaan dana desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesi.

Setiap tahun angka kemiskinan di indonesia khususnya di pedesaan lebih tinggi dari pada perkotaan dari data hasil statistik yang dihasilkan oleh BPS menunjukan bahwa orang miskin di indonesia dilihat dari hasil observasi sebagai berikut

Tabel 1.1 Data Kemiskinan Kota Dan Desa Secara Nasional



DATA KEMISKINAN KOTA	DATA KEMISKINAN DESA
Maret 2017(7.73%) (10.67 juta)	Maret 2017 (13.93%)(17.10 juta)
Semptember 2017(7.26%) (10.27 juta)	September 2017 (13.47%) (16.31 juta)
Maret 2018 (7.02%) (10,14 juta)	Maret 2018 (13.20%) (15,81 Juta)
September 2018 (6.89%) (10.13 juta)	September 2018 (13.10%) (15.54 juta)
Maret 2019 (6.69%) (9.99 juta)	Maret 2019 (12.85%) (15.15 juta)
September 2019 (6.56%) (9.86 juta)	September 2019 (12.60%)(14.93 juta)

Dalam tabel 1.1 di atas menggambarkan kemiskinan yang terjadi seluruh Indonesia secara umum baik yang terjadi antara desa dan kota di Indonesia

terlihat bahwa kemiskinan yang terjadi pada di tahun 2017 baik desa dan kota memiliki selisih hampir 7 juta jiwa tercatat baik desa dan kota lalu bagaimanakah kemiskinan yang terjadi kabupaten Bojonegoro berikut adalah gambaran umum kemiskinan di kabupaten Bojonegoro

Tabel 1.2

Indeks Kedalaman dan Keparahan kemiskinan kurun waktu 2015 - 2019

Indeks Kemiskinan	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan				
	2019	2018	2017	2016	2015
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,95	1,87	2,31	2,41	2,01
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,43	0,39	0,52	0,54	0,42
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro					
BPS Provinsi Jawa Timur					
Access Time: December 28, 2020, 4:13 pm					

Dari data di atas terlihat dari indeks kemiskinan yang terjadi di Bojonegoro memiliki mengalami kenaikan dan penurunan yang bervariasi setiap tahunnya dalam indeks kedalaman kemiskinan dan keparah kemiskinan, dalam tabel di atas baik kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan yang disajikan dalam jumlah presentasi dengan menggunakan dua penilaian setiap tahunnya gambaran umum kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan dalam indeks kedalaman kemiskinan dari tahun 2015-2019 dimana semakin besar nilainya semakin dalam pula kemiskinannya dalam indeks keparahan kemiskinan yang terjadi dalam kurun waktu 2015-2019 keparahan yang bervariasi semakin besar nilai semakin parah kemiskinannya namun dalam pengamatan memiliki kenaikan dan penurunan yang bervariasi apakah itu berkaitan dengan pemberian otonomi daerah ke Kabupaten Bojonegoro

Dengan adanya Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas,

lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Peraturan-peraturan yang di wewenangkan pada pemerintah daerah juga mengenai peraturan perekonomian. Perekonomian pemerintah daerah bisa dihasilkan melalui potensi daerah masing-masing (Sani 2017).

Otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri, termasuk juga dalam bidang perekonomian, karena pemerintah daerah di anggap lebih mengenal daerahnya masing-masing sehingga akan lebih bisa mengembangkan daerahnya melalui otonomi daerah yang di berikan salah satunya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sampai ke unsur terkecil yaitu pemerintah desa dengan adanya otonomi ini di harapkan desa mampu mandiri dalam hal pengelolaan keuangan salah satunya adanya dana yang berasal dari pemerintahan yang bersumber dari APBN yaitu Dana Desa dan APBD yaitu Alokasi Dana Desa menjadi acuan dalam APBDes yang akan di rancang dalam kegiatan operasional pemerintahan daerah.

Melihat besarnya Dana Desa yang menjadi salah satu pendapatan desa yang berasal dari APBN yang bahkan setiap tahunnya tidak pernah menurun sejak diluncurkannya pada tahun 2015 sampai pada tahun 2019 dengan total sebesar Rp 257 triliun selama 5 tahun dengan rincian berikut Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018), dan Rp 70 triliun (2019).

Selama hampir empat tahun sejak dana desa disalurkan, desa-desa di Indonesia telah mampu membangun infrastruktur dasar dalam jumlah yang sangat besar dan masif, yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan

hidup dasar dan juga untuk membantu kegiatan ekonomi di desa. Hasil terbaiknya selama empat tahun tersebut, yakni terbangunnya sarana dan prasarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Contohnya, terbangunnya 1.140.378 meter jembatan, jalan desa 191.600 kilometer, pasar desa sebanyak 8.983 unit, kegiatan BUMDesa sebanyak 37.830 unit, embung desa sebanyak 4.175 unit, sarana irigasi sebanyak 58.931 unit. Selain itu, dana desa juga telah turut membangun sarana prasarana penunjang kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan 959.569 unit sarana air bersih, 240.587 unit Mandi Cuci Kakus (MCK), 9.692 unit Polindes, 50.854 unit PAUD, 24.820 unit Posyandu, serta drainase 29.557.922. Total Dana Desa 2019-2024 Rp 400 Triliun (Gatra, 2019)

Kabupaten atau Kota melaksanakan proses penghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis. (BPKP, 2017)

Dana Desa merupakan salah satu kunci dalam program pemerintah yaitu pengentasan kemiskinan yang angkanya lebih besar di desa dari pada perkotaan dan Dana Desa memiliki pengaruh terhadap kemiskinan dan di buktikan oleh penelitian Putra (2018), Wahyudi *et al.*, (2019), Sunu dan Utama (2019), dapat di simpulkan dari penelitian tersebut bahwa Dana Desa memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah perdesaan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang terdapat di desa bisa lebih baik dan sejahtera

Alokasi Dana Desa menjadi tulang punggung pada pemerintah desa karena Alokasi Dana Desa menjadi pembiayaan oprasional untuk kegiatan di kantor kepala desa Selain Dana Desa, Desa memperoleh Alokasi Dana Desa

dana bersumber pemerintah daerah maupun pusat dimana diharapkan pemerintah desa mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayanan dasar masyarakat desa. Alokasi Dana Desa menjadi substansi yang baru dalam pemerintahan desa karena akan menjadi patokan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dimana pengalokasiannya 30% untuk belanja aparatur desa, dan 70% program pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur desa dan sarana publik. Hal ini menjadi penunjang kesuksesan nasional dengan adanya pemanfaatan desa dan sumberdaya potensi yang dimiliki (Henareza, 2014)

Menurut Mamonto *et al.*, (2020) Alokasi Dana Desa (ADD) Adanya alokasi dana desa dapat membantu masyarakat yang kurang mampu. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang di salurkan pemerintah ke desa untuk membantu pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no.37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di dalam pasal 18 menyatakan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (BPKP, 2017) Tata Cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Pengalokasian ADD kepada setiap desanya mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa

Penghasilan Tetap, operasional pemerintah desa, dan tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT dan RW dibiayai dengan menggunakan

sumber dana dari Alokasi Dana Desa (BPKP, 2017) maka dari itu Alokasi Dana Desa menjadi instrumen yang penting untuk Pemerintahan Desa dalam kegiatan operasional maupun kegiatan pengentasan kemiskinan desa, di buktikan dengan penelitian yang di lakukan Mamonto *et al.*,(2020) Dewi & Irama (2018) dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa memiliki pengaruh yang langsung maupun tidak langsung dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa

Kemiskinan menjadi masalah setiap pemerintah tidak lepas yaitu pemerintahan Kabupaten Bojonegoro yang dapat di jabarkan pada tabel berikut yang dirilis oleh BPS Kabupaten Bojonegoro

Tabel 1.3

Indeks Kemiskinan Terjadi 2017 - 2019

Kemiskinan	Indeks Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro		
	2019	2018	2017
Garis Kemiskinan (Rp)	347 786,00	330 544,00	309 564,00
Penduduk Miskin (000 jiwa)	154,64	163,94	178,25
Penduduk Miskin (%)	12,38	13,16	14,34
Sumber: data sekunder BPS tahun 2019			
Di akses pada: December 28, 2020, 4:13 pm			

Berikut adalah indeks kemiskinan kabupaten Bojonegoro yang memiliki penentuan penilainya yang dimana kemiskinan disajikan dalam jumlah pendapatan yang diterima dalam Jumlah Rupiah setiap tahunnya dan data jumlah penduduk yang tergolong dengan penduduk miskin yang disajikan ratusan ribu jiwa setiap tahunnya dan jumlah penduduk miskin yang digambarkan dengan presentase kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan presentase kemiskinan pada tahun 2017 sebesar presentase 14,34% dan tahun 2018

sebesar presentase 13,16% dan tahun 2019 sebesar 12,38% mengalami penurunan setiap tahun

Data hasil yang dirilis oleh BPS pada tahun 2019 garis kemiskinan nasional sebesar Garis Kemiskinan pada September 2019 tercatat sebesar Rp440.538,-/ kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp324.911,- (73,75 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp115.627,- (26,25 persen).Garis kemiskinan di kabupaten Bojonegoro sebesar mengalami kenaikan setiap tahunnya yang mana pada 2019 sebesar Rp347.786 maka dari itu sangat penting buat kita lihat bahwa kemiskinan di Bojonegoro dilihat dari garis kemiskinan semakin naik tapi dari sisi jumlah mengalami penurunan setiap tahunnya pada tahun 2017 sebesar 178.250 jiwa dan pada 2018 mengalami penurunan sebesar 163.940 jiwa dan mengalami penurunan lagi 2019 sebesar 154.640 jiwa makadari itu menarik untuk diteliti

Tingginya APBD Bojonegoro Jawa Timur hingga mencapai Rp 7,1 triliun(APBD 2019),belum biasa menurunkan kemiskinan secara signifikan.Justru indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan tahun 2019 ini meningkat dibanding 2018 .Direktur Bojonegoro institute (BI), Aw Syaiful Huda, menyampaikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang di analisis ,pada tahun 2019 angka kemiskinan Bojonegoro hanya turun sekitar 0,78 persen.Lebih rendah dibanding tahun 2018 lalu mencapai 1,18 persen penurunannya(Wedia, 2019).

Besaran Dana Desa (DD) tahun 2019 sudah ditetapkan sementara DD sebanyak Rp 367 miliar lebih (Rp367.310.000).Besaran sementara Dana Desa tahun ini sesuai Peraturan Bupati (Perbup) nomor 3 Tahun 2019 tentang besaran sementara DD untuk setiap desa (Wahyudi 2019).

Besaran total anggaran dana desa (ADD) yang dikucurkan untuk 419 desa di Kota Ledre penyebutan untuk Kabupaten Bojonegoro menembus angka Rp 617 miliar. Angka tersebut naik cukup fantastis dibanding ADD dalam APBD induk yang hanya Rp 310 miliar. Angka Rp 310 miliar tersebut tercantum dalam Perbup Nomor 06 Tahun 2019 tentang Besaran Sementara Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Setiap Desa. (Fauzie, 2020) Lalu bagaimanakah rincian besaran pembagian dana baik Dana Desa dan Alokasi Dana Desa akan di paparkan pada tabel berikut.

Tabel 1.4
Tabel Besaran Alokasi Dana Desa per Kecamatan di Bojonegoro
Tahun 2019

No	Kecamatan	Besaran Alokasi Dana Desa (RP)	Jumlah Desa
1	Bojonegoro	5.162.120.200	7
2	Kapas	14.701.803.400	24
3	Trucuk	8.418.834.300	12
4	Sukosewu	9.801.300.900	14
5	Balen	16.268.145.200	23
6	Sugihwaras	11.942.729.600	17
7	Temayang	8.663.714.800	12
8	Dander	12.349.324.200	16
9	Baureno	17.632.530.100	25
10	Kepohbaru	17.733.319.300	25
11	Kedungadem	16.883.920.100	23
12	Sumberrejo	18.201.945.900	26
13	Kanor	17.259.056.000	25
14	Kalitidu	13.337.536.200	18
15	Bubulan	3.690.894.100	5
16	Gondang	5.432.718.900	6
17	Ngasem	13.770.969.400	17
18	Kedewan	3.531.141.400	5
19	Malo	13.533.040.530	20
20	Purwosari	9.812.510.800	21
21	Ngambon	3.526.685.800	5
22	Padangan	11.074.017. 700	16
23	Kasiman	7.110.265.600	10
24	Tambakrejo	13.542.353.200	18
25	Ngraho	11.835.525.400	16
26	Margomulyo	5.017.024.500	6
27	Sekar	4.989.625.100	6

28	Gayam	15.404.164.700	12
----	-------	----------------	----

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan , kementerian desa

Tabel 1.5

Tabel Besaran Dana Desa per Kecamatan di Bojonegoro tahun 2019

No	Kecamatan	Besaran Dana Desa (RP)	Jumlah Desa
1	Bojonegoro	5.361.787.500	7
2	Kapas	16.413.994.500	24
3	Trucuk	10.001.379.200	12
4	Sukosewu	11.956.655.400	14
5	Balen	18.288.851.300	23
6	Sugihwaras	14.525.912.700	17
7	Temayang	10.829.335.200	12
8	Dander	14.443.447.600	16
9	Baureno	19.834.427.800	25
10	Kepohbaru	21.536.096.500	25
11	Kedungadem	22.179.465.300	23
12	Sumberrejo	21.064.237.600	26
13	Kanor	19.880.999.500	25
14	Kalitidu	15.065.007.800	18
15	Bubulan	5.009.040.500	5
16	Gondang	8.170.09500	6
17	Ngasem	15.567.402.700	17
18	Kedewan	4.198.510.800	5
19	Malo	17.123.520.000	20
20	Purwosari	10.704.990.200	21
21	Ngambon	5.115.883.500	5
22	Padangan	12.550.909.600	16
23	Kasiman	9.104.849.000	10
24	Tambakrejo	17.792.169.800	18
25	Ngraho	15.282.492.600	16
26	Margomulyo	6.506.454.600	6
27	Sekar	8.695.655.600	6
28	Gayam	9.997.738.200	12

Sumber : Direktorat jenderal keuangan, kementerian desa

Penelitian ini berada pada masyarakat desa yang masuk ke dalam

kecamatan Baureno dilihat pada tabel 1.3 besaran Alokasi Dana Desa

kecamatan Baureno menerima dana sebesar Rp. 17.632.530.100 dengan jumlah

desa mencapai 25 desa dan merupakan penerima Alokasi Dana Desa terbesar

ke tiga setelah kecamatan Kepohbaru dan Kecamatan Sumberrejo. Selain

menerima Alokasi Dana Desa juga menerima Dana Desa dengan dana

Rp19.834.427.800 dengan jumlah desa mencapai 25 desa dan penerima Dana

Desa terbesar kelima terbesar setelah kecamatan Kanor, kecamatan Sumberrejo, kecamatan Kepohbaru, kecamatan Kedungadem dengan besarnya dana yang di terima baik Alokasi Dana Desa dan Dana Desa apakah bisa memberikan dampak terhadap penurunan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat desa di kecamatan Baureno hal ini bisa di jelaskan pada penelitian yang di lakukan oleh Albabet *al.*, 2019 dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Tipologi Desa Tertinggal di Kabupaten Bojonegoro” dalam penelitian bahwa terdapat tiga perkembangan wilayah dari desa maju, desa berkembang, desa tertinggal dalam penelitian kecamatan Baureno terdapat 8 desa maju dengan presentasi 32%, 15 desa berkembang dengan presentasi 60 %, dan 2 desa tertinggal dengan presentasi sebesar 8%, bari hasil penelitian yang dilakukan oleh Albabet *all.*, terdapat 60 % desa yang berkembang hal ini menunjukan bahwa desa di kecamatan Baureno sedang bangkit dari desa tertinggal yang dimana di dukung oleh pembangunan infrastruktur sarana dan prasaran sehingga dapat membantu segala aktifitas masyarakat desa, namun terdapat juga 2 (dua) desa tertinggal dengan nilai 8%, desa tertinggal di sebakpan oleh fasilitas, akseibilitas desa tertinggal belum memadai, (Albani *et al.*, 2019) hal tersebut di karenakan masih jalan berupa tanah dan sempit dan tidak adanya penerangan. Selain masih terdapatnya desa tertinggal di kecamatan Baureno menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Aw Syaiful Huda, 2021 dalam penelitiannya “*Poverty Resource Center Intiative (PRCI)*” pada tahun 2019 kecamatan Baureno memiliki kemiskinan sebesar 5.418 rumah tangga, dari hasil penelitian di peroleh bahwa jumlah penduduk Bojonegoro masuk kedalam status kesejahteraan 40% terendah di Indonesia (Huda, 2019)

dengan jumlah 154.000 orang berikut ini tabel besaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Kecamatan Baureno

Tabel 1.5
Tabel Penerimaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa seluruh Desa di kecamatan Baureno Tahun 2017-2019

Data keseluruhan Alokasi Dana Desa & Dana Desa se Kecamatan Baureno			
ADD 2017	RP 10.144.565.000	DD 2017	RP 19.675.508.700
ADD 2018	RP 11.851.194.700	DD 2018	RP 17.649.356.500
ADD 2019	RP 17.632.530.100	DD 2019	RP 19.834.427.800

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan, kementerian desa (data diolah)

Tabel 1.5 menjelaskan bahwa dalam kurun waktu dari tahun 2017 sampai 2019 dalam melaksanakan kegiatannya pemerintahan desa pengalokasian dana sebesar itu apakah kepala desa lebih mengarahkan dana itu untuk pembangunan infrastruktur atau pemberdayaan masyarakat, dalam mengambil keputusan kepala desa akan menyerap usulan masyarakat dalam musrembangdes maka pemerintah desa dan aparatur desa akan berusaha meningkatkan dan melakukan hal yang terbaik tujuan organisasi sangat sesuai dengan teori *Stewardship*

Penelitian ini menggunakan landasan Teori *Stewardship*. Alasan dibalik penelitian ini menggunakan Teori *Stewardship* adalah dalam penelitian ini mampu menjelaskan keterkaitan variabel yang ada dalam penelitian ini. Teori *Stewardship* karena dalam teori menjelaskan bahwa dimana eksekutif sebagai pengelola termotivasi untuk melakukan yang terbaik dalam mencapai tujuan organisasi (Donaldson dan David, 1991) dalam (N Wahida, 2015)

Dengan demikian Teori *Stewardship* adalah teori yang sesuai dalam penelitian ini dimana setiap aparatur desa baik itu kepala desa maupun aparatur desa yang membantunya memiliki tujuan yang sama dimana memiliki tujuan

untuk memperbaiki desa guna mensejahterakan masyarakat yang tergambar dalam Teori *Stewardship*

Penelitian ini adalah pengembangan hasil penelitian yang dilakukan oleh Larila *et al.*, (2018), Dewi dan Irama (2018) dan Arfiansyah (2020) dalam penelitian Larila *et al.*, (2018) menggunakan semua variabel, Dewi dan Irama (2018) sama halnya dengan Arfiansyah (2020) hanya ada dua variabel yang sama dengan peneliti, terdapatnya ketidak konsistenan penelitian ini adalah dalam penelitian Larila *et al.*, (2018) dari semua variabel yang digunakan baik independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya namun berbeda dengan penelitian Dewi dan Irama memiliki pengaruh terhadap variabel independennya dengan variabel dependennya sama halnya Arfiansyah (2020) variabel independennya memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya adanya ketidak konsistenan dalam penelitian ini dari hasil semua penelitian sebelumnya memiliki hasil yang saling bertolak belakang

Berdasarkan pemaparan dan fenomena yang ada dari itu peneliti memiliki ketertarikan untuk **“PENGARUH DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP KEMISKINAN DI KECAMATAN BAURENO TAHUN 2017-2019**

1.2 Rumusan masalah :

Mengacu pada ketidak konsistenan penelitian terdahulu dilatar belakang maka muncul rumusan masalah yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh jumlah dana desa terhadap kemiskinan.
2. Apakah ada pengaruh jumlah alokasi dana desa terhadap kemiskinan.
3. Apakah ada pengaruh jumlah dana desa dan alokasi dana desa secara bersama-sama terhadap kemiskinan.

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah maka didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah dana desa terhadap tingkat kemiskinan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi pemerintahan kabupaten Bojonegoro

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan memberikan hasil pemikiran bahan kajian berguna dalam pengambilan kebijakan dalam pengelolaan dan dana desa dan alokasi dana desa.

2. Manfaat Teoritis dan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran dan informasi untuk peneliti selanjutnya yang tertarik pada penelitian berkaitan dana desa dan alokasi dana desa.

3. Manfaat Praktis

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Universitas Trunojoyo Madura sehingga memperoleh gelar sarjana ekonomi dan sebagai pengalaman penulis dalam menyusun suatu karya ilmiah.